

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA YOGYAKARTA

EMPOWERMENT OF WOMEN VIOLENCE IN HOUSEHOLD IN THE SOCIAL PROTECTION AND REHABILITATION OF WOMEN YOGYAKARTA

Oleh: Yuliana Nur Azizah dan Drs. Argo Pambudi, M.Si

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, yuliana.nur2015@student.uny.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemberdayaan perempuan korban KDRT di BPRSW Yogyakarta dilakukan melalui tahap penyadaran yang menyebabkan perubahan sikap menjadi lebih terbuka dan berani mengambil keputusan, tahap transformasi kemampuan, berdampak pada perubahan kemampuan yaitu peningkatan keterampilan batik, jahit, tataboga, dan salon serta perubahan sikap menjadi berfikir lebih positif dan percaya diri untuk merencanakan masa depan, tahap peningkatan kemampuan intelektual berdampak pada munculnya peluang untuk warga binaan korban KDRT menjadi lebih mandiri. (2) Faktor pendukungnya antara lain fasilitas yang memadai, program tidak dipungut biaya, motivasi belajar warga binaan tinggi, dan instruktur keterampilan yang kompeten sedangkan faktor penghambatnya, syarat pemberian bantuan stimulan sulit, bimbingan psikologi kurang maksimal, kurangnya kegiatan kewirausahaan, dan kurangnya dukungan dari keluarga

Kata Kunci: Pemberdayaan, Perempuan, KDRT

ABSTRACT

This study aims to determine the empowerment women victims of domestic violence at the Yogyakarta Women's Social Protection and Rehabilitation Center (BPRSW) and its supporting and inhibiting factors. The research method used descriptive qualitative. The results showed that: (1) the empowerment of women is carried out through the awareness stage which causes a change in attitude to be more open and brave to make decisions, the stage of transformation of abilities that have an impact on ability changes, namely improving batik, sewing, embroidery, and salons as well as a change in attitude to think more positively and confidently to plan for the future, the stage of increasing intellectual abilities has an impact on the emergence of opportunities to become more independent. (2) Supporting factors are adequate facilities, programs that are free of charge, high motivation for learning fostered citizens, and competent appearance instructors while inhibiting factors include the provision of difficult stimulant assistance, guidance lack of psychology, lack of entrepreneur activity, and lack of family support.

Keywords: Empowerment, Women, Domestic Violence

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak kriminal di Indonesia yang dapat terjadi pada laki laki (suami) maupun perempuan (istri) namun mayoritas pelakunya adalah laki-laki. Sebagai contoh, laporan Legal Resources Center untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRJ-KJHAM) pada tahun 2013 mengidentifikasi dari 717 kasus KDRT tercatat 532 laki-laki orang teridentifikasi sebagai pelaku. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Selatan, dari 1746 kasus KDRT pada tahun 2018, sebanyak 1336 korban adalah perempuan. Contoh data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas KDRT dilakukan oleh laki-laki atau suami sehingga dapat disimpulkan bahwa yang rentan menjadi korban KDRT adalah perempuan atau istri.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak luput dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berikut ini adalah tabel jumlah kasus KDRT tahun 2015-2018:

Tabel 1. Data Kasus KDRT di Provinsi DIY tahun 2015-2018

No	Tahun	Jumlah
1	2015	1.051
2	2016	959
3	2017	1.172
4	2018	867

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (2018)

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan kasus KDRT di Provinsi DIY pada tahun 2016 sebanyak 92 kasus dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan sejumlah 213 kasus. Kemudian pada tahun 2018

kembali mengalami penurunan sebanyak 305 kasus. Dengan demikian jumlah kasus KDRT di Provinsi DIY mengalami fluktuatif dalam empat tahun terakhir.

KDRT memiliki dampak yang tidak baik bagi perempuan atau korban. Johnson dkk (2008) mengemukakan bahwa selain dampak langsung secara fisik dan emosional dari kekerasan, kualitas hidup perempuan secara keseluruhan juga dapat terhambat. Oleh karena itu disamping usaha pencegahan KDRT, penting juga dilakukan usaha penanggulangan. Tujuan dari penanganan tersebut agar kondisi para korban terutama psikologisnya kembali pulih sehingga dapat bersosialisasi kembali di masyarakat. Akan tetapi pemulihan kondisi psikologi saja tidak cukup karena perempuan korban KDRT juga perlu untuk diberdayakan serta dibina. Pemberdayaan yang dimaksud yaitu pengembangan potensi korban baik berupa pengetahuan, sumberdaya, kesempatan, maupun keterampilan untuk meningkatkan kapasitas korban.

Dinas Sosial bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan program pemberdayaan untuk membantu wanita dengan permasalahan sosial dengan jangka waktu 12 bulan masa pemberdayaan. Perempuan yang dibina atau menjadi warga binaan di BPRSW Yogyakarta disebut sebagai klien. Salah satu sasaran BPRSW adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Di BPRSW Yogyakarta mayoritas pendidikan klien korban KDRT tidak menempuh pendidikan sampai jenjang perguruan

tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Walker (1979) bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada semua usia, jenis kelamin, suku bangsa, budaya, agama, jenjang pendidikan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, sesuai tabel di atas meskipun terdapat warga binaan atau klien dengan jenjang pendidikan perguruan tinggi, mereka juga tidak lepas dari tindak KDRT.

Jenis KDRT yang dialami klien BPRSW salah satunya yaitu KDRT psikis. Terdapat 2 klien dengan jenis KDRT psikis. Kekerasan psikis yang diterima korban menyebabkan mereka menjadi cukup sulit menerima program pemberdayaan di BPRSW terbukti dari lama waktu menetap di BPRSW Yogyakarta yang lebih dari dua tahun. Selain itu, hampir sebagian besar klien korban KDRT mengalami penelantaran sehingga mereka butuh tempat yang dapat memberdayakan serta membina mereka karena mayoritas klien korban KDRT tidak mengenyam pendidikan yang cukup jadi mereka dapat memperoleh keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Seperti yang diungkapkan Parsons dalam Anwas (2014:49) bahwa pemberdayaan merupakan pemberian keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta berupaya untuk mengarahkan para korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memperbaiki maupun meningkatkan kondisi mental serta kepercayaan diri mereka agar mampu meningkatkan semangat hidup. Pentingnya kegiatan pemberdayaan untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga agar mereka dapat mengembangkan potensi

melalui program keterampilan yang disediakan BPRSW Yogyakarta sehingga nantinya keterampilan yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta melakukan program pemberdayaan perempuan untuk mengembangkan potensi warga binaan melalui beberapa kelas keterampilan, yaitu keterampilan batik, keterampilan olahan pangan, keterampilan jahit, dan keterampilan tatarias. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta menampung warga binaan dari seluruh wilayah DIY yaitu Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta”**. Hal ini penting dilakukan guna memberikan gambaran mengenai bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta dalam memberikan pelayanan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pranaka dan Muljarto dalam Anwas (2014:50) pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, dan tata nilai dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab Kemudian menurut Aida Vitayala (2010: 119-120) mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan perempuan antara lain; (1) Motivasi

perempuan untuk memberdayakan diri: hal ini memerlukan bantuan sarana dan prasarana (manusia, kelembagaan, dan tatanan) yang mampu memotivasi perempuan untuk memberdayakan diri, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk keluarga. (2) Program-program tepat guna dan berdaya guna yang memiliki nilai tambah ekonomi bagi pemberdayaan perempuan: berarti kepedulian kalangan perguruan tinggi, swasta, dan LSM selain pemerintah merupakan elemen penting yang perlu dimantapkan dalam bentuk tatanan mekanisme kelembagaan pemberdayaan sumber daya perempuan secara terstruktur. (3) Dukungan berdedikasi dari seluruh aparat terlibat: dalam hal ini, pelibatan perempuan untuk pemberdayaan sumberdaya perempuan perlu dibuat secara spesifik menurut segmen sasaran khalayak, menurut status dan segmen ekonomi. (4) Peran aktif masyarakat: dalam hal ini, kesamaan pemahaman akan makna pemberdayaan perempuan merupakan prasyarat tercapainya hasil optimal penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan peran wanita.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori tahapan pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004:83) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku dalam tahap ini pihak pemberdaya berusaha untuk menciptakan kondisi dan memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan agar proses pemberdayaan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Melalui tahap penyadaran maka masyarakat akan terbuka oleh kondisi yang sedang mereka hadapi.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan kecakapan keterampilan. Tahap ini akan dapat berjalan apabila masyarakat mampu melewati tahap pertama dengan baik. Pada tahap ini masyarakat akan mencari tahu apa saja yang mereka butuhkan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Keadaan ini akan membantu masyarakat untuk belajar keterampilan sehingga dapat membuka wawasan pengetahuan tentang keterampilan yang nantinya akan bermanfaat bagi mereka kedepannya.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan yang diperlukan. Tahap ini dapat membentuk masyarakat menjadi mandiri dan memiliki keterampilan serta pengetahuan yang luas akan kondisi masyarakat yang mereka hadapi. Kemandirian dan keterampilan masyarakat akan terbentuk apabila masyarakat mampu membantu inovasi di lingkungannya yang nantinya dapat berguna untuk mengembangkan diri mereka dalam mencapai tujuan pemberdayaan yang mereka harapkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta Bulan April – Agustus 2019.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pekerja Sosial BPRSW Yogyakarta, tiga instruktur keterampilan,

dan enam orang warga binaan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan dilengkapi pedoman wawancara dan observasi. Moleong (2014: 157) berpendapat bahwa sumber data utama penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, ditambah dengan data pendukung berupa dokumentasi, dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian secara langsung melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen dari dokumen data klien KDRT di BPRSW tahun 2019, Dokumen jadwal kegiatan daftar sarana prasarana BPRSW, dokumen jadwal bimbingan mental, hasil penelitian yang relevan, dan dokumen resmi lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik yang meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid dan Abu, 2008: 83). Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan mengenai garis besar permasalahan agar peneliti lebih fokus bertanya kepada informan.

Hasil wawancara digunakan untuk melengkapi data-data yang telah

diperoleh melalui proses observasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan bertanya kepada informan mengenai data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga diperoleh data yang kongkrit dan jelas mengenai proses pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta.

2. Observasi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi nonpartisipatif. Observasi nonpartisipatif menurut Sugiyono (2011:145), yaitu peneliti tidak perlu terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, dan hanya sebagai pengamat independen. Jadi peneliti hanya mengamati kegiatan dari objek yang diteliti secara langsung kemudian didokumentasikan ke dalam catatan-catatan lapangan sebagai sumber informasi untuk diolah menjadi bahan analisis dalam pembahasan. Kegiatan observasi dilakukan langsung di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta untuk menggali informasi tentang tahapan proses pemberdayaan perempuan, faktor pendukung, serta faktor penghambat.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh dokumen pendukung seperti profil Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta, dokumen kegiatan pemberdayaan di BPRSW Yogyakarta, dan dokumen data klien korban kekerasan dalam rumah tangga BPRSW Yogyakarta.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 246) yang menjelaskan bahwa analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis tersebut terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada teori yang disampaikan oleh Sulistiyani (2004: 84) beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan perempuan antara lain: (1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, (2) Tahap transformasi kemampuan, (3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual..

Tahapan tersebut sesuai dengan kondisi yang peneliti temukan di lapangan terkait pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Balai Pelindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPSW) Yogyakarta. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu:

1. Tahap Penyadaran dan Pembentukan dan Perilaku

Seperti yang sudah diungkapkan Sulistiyani (2004:80) dalam bukunya, tahap pertama yang dilakukan dalam proses pemberdayaan adalah tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Pada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku yang diungkapkan oleh Sulistiyani, pihak pemberdaya berusaha untuk menciptakan kondisi dan memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan, agar proses pemberdayaan tersebut

dapat berjalan secara efektif dan efisien. Melalui tahap penyadaran maka masyarakat akan terbuka oleh kondisi yang sedang mereka hadapi. Setelah mereka sadar kemudian mereka akan mampu mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi tersebut.

BPRSW Yogyakarta yaitu Pekerja Sosial melakukan penyadaran dan pembentukan perilaku terhadap perempuan korban KDRT salah satunya dengan cara sosialisasi yaitu menyebarluaskan informasi terkait keberadaan BPRSW, fungsi, tujuan, dan program-program yang ada ke daerah yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota se-DIY dan juga melalui media massa maupun leaflet. Sosialisasi juga dilakukan dengan melakukan penjangkauan atau penjangkauan langsung ke komunitas atau individu sasaran yang masuk kriteria penerimaan klien di BPRSW, salah satunya perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Melalui proses sosialisasi, BPRSW membuka kesadaran kelompok sasaran tentang kondisi mereka saat ini dan BPRSW Yogyakarta ada untuk menangani perempuan korban KDRT tersebut. Dengan demikian, proses tersebut dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi yang saat ini mereka hadapi dan membuat tertarik menjadi warga binaan BPRSW Yogyakarta untuk dibimbing agar dapat menjadi lebih mandiri.

Melalui proses sosialisasi, sebagian masyarakat jadi mengetahui keberadaan BPRSW Yogyakarta. Hal tersebut dibuktikan juga dengan

adanya korban KDRT yang mendaftar secara mandiri tanpa harus didatang oleh BPRSW Yogyakarta. Akan tetapi proses sosialisasi dirasa masih kurang efektif karena perbandingan jumlah kasus KDRT yang ada di DIY dengan jumlah warga binaan di BPRSW Yogyakarta tidak sebanding. Dari 980 kasus KDRT yang ada, hanya 8 orang saja yang masuk ke BPRSW Yogyakarta.

Selain melalui sosialisasi, tahap penyadaran juga dilakukan dengan cara pendekatan awal yang dilakukan oleh pekerja sosial BPRSW Yogyakarta setelah mendapat laporan dari masyarakat atau rujukan (tokoh masyarakat, organisasi sosial, LKS/LSM), atau instansi terkait lainnya) dan atau daftar secara mandiri. Kemudian Pekerja Sosial BPRSW Yogyakarta akan memberikan pemahaman detail kepada keluarga ataupun kepada calon klien, beserta hak dan kewajiban yang akan diterimanya selama di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta sehingga calon klien bersedia untuk mengikuti program di BPRSW.

Cara lain yang dilakukan adalah pemberian motivasi. Pekerja Sosial melakukan motivasi untuk menumbuhkan kesadaran dan minat calon klien agar mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial yang dilakukan secara langsung maupun melalui keluarga atau teman dekat agar klien bersedia untuk mengikuti program bimbingan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta. Motivasi diberikan agar kelompok sasaran bangkit dari

keterpurukan yang dihadapi. Pemberian motivasi juga bertujuan untuk mengubah pola pikir klien korban KDRT meskipun saat ini kondisi mereka sedang tidak bagus tetapi mereka tetap dapat bangkit dan memiliki rencana hidup ke depan sehingga dapat belajar kembali untuk melatih keterampilan atau *skill* agar nantinya hidup mereka lebih mandiri.

Pemberian motivasi untuk calon warga binaan BPRSW Yogyakarta sudah efektif dilakukan karena hampir seluruh klien korban KDRT di BPRSW Yogyakarta bersedia mengikuti program pemberdayaan karena termotivasi untuk bangkit dari masalah yang dihadapi sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak manapun.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Waryatin, tahap penyadaran yang dilakukan oleh LKP “Bu Nandang” berupa penyadaran mengenai potensi perempuan, peranan perempuan, dan kemampuan perempuan untuk mandiri berwirausaha. Tahap ini dilakukan dengan memberikan motivasi, masukan, dan pengalaman kerja kepada warga yang belajar. Dalam memberikan penyadaran, LKP “Bu Nandang” juga melakukan kampanye dan sosialisasi program melalui media sosial. Hal yang sama juga dilakukan oleh BPRSW Yogyakarta dalam melakukan penyadaran yaitu sosialisasi melalui media promosi seperti *leaflet* dan media sosial serta melakukan motivasi. Akan tetapi dalam proses penyadaran, BPRSW Yogyakarta tidak memberikan pengalaman kerja karena kegiatan tersebut dilakukan pada tahap

peningkatan kemampuan intelektual setelah pemberian keterampilan selesai dilakukan.

2. Tahap Transformasi Kemampuan

Setelah tahap pertama berjalan dengan baik maka tahapan ke dua pada proses pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sulistiyanis yaitu tahap transformasi kemampuan yang berupa wawasan pengetahuan dan kecakapan keterampilan. Pada tahap ini masyarakat akan mencari tahu apa saja yang dibutuhkannya sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Keadaan ini akan membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, sehingga dapat membuka wawasan pengetahuan tentang keterampilan kepada masyarakat yang nantinya akan bermanfaat bagi mereka kedepannya.

Pada tahap ini klien korban kekerasan dalam rumah tangga akan menerima materi pemberdayaan yang dilakukan melalui beberapa tahap bimbingan yaitu bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan.

Bimbingan fisik yang diberikan meliputi pemeliharaan kesehatan dengan berbagai kegiatan olahraga, senam rutin setiap hari Jumat, kerja bakti berupa bersih-bersih, dan penyuluhan bahaya narkoba. Pemberian bimbingan fisik ini sudah cukup optimal karena klien korban KDRT di BPRSW Yogyakarta sudah bisa merasakan manfaat dari bimbingan fisik ini yaitu kesehatannya menjadi lebih terjaga serta pengetahuan tambahan terkait bahaya narkoba sehingga mereka bisa menghindari barang-barang terlarang tersebut.

Bimbingan mental, meliputi bimbingan keagamaan berupa ceramah agama maupun tata cara beribadah yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan klien. Terdapat pula bimbingan kesehatan mental, bimbingan kedisiplinan dan terapi kelompok atau biasa disebut outbond yang dilakukan setahun sekali dengan tujuan untuk menghilangkan kejenuhan klien. Meskipun program bimbingan mental melalui bimbingan agama sudah mampu menjadikan klien korban KDRT di BPRSW Yogyakarta menjadi lebih termotivasi dan semangat untuk belajar keterampilan lebih giat lagi tetapi bimbingan mental ini masih belum optimal karena belum mampu mengembalikan mental atau psikologi klien sehingga klien KDRT belum maksimal dalam menerima materi pemberdayaan.

Bimbingan sosial, meliputi kegiatan dinamika kelompok yaitu kegiatan bimbingan terhadap klien melalui permainan-permainan yang dibentuk secara kelompok untuk membimbing klien agar mampu melaksanakan hubungan sosial yang dinamis dan harmonis. Selain itu juga terdapat bimbingan kewirausahaan untuk melatih jiwa kewirausahaan klien korban KDRT yang dilakukan setahun sekali melalui kegiatan bazar. Akan tetapi waktu pelaksanaan yang hanya sekali dalam satu tahun sangatlah kurang apabila tujuan dari bimbingan kewirausahaan adalah menjadikan klien mandiri dan memiliki usaha sendiri.

Bimbingan keterampilan. Tujuan pemberian bimbingan keterampilan untuk menambah *skill* setiap warga

binaan di BPRSW agar setelah lulus dapat membangun usaha atau bekerja terutama untuk warga binaan yang kurang mampu dan tidak dapat melanjutkan pendidikan, mereka tetap dapat bekerja dengan kemampuan yang diperoleh dari BPRSW. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pemberdayaan menurut Sulistiyan (2004:80) yaitu membentuk masyarakat menjadi mandiri yang meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Terdapat 13 orang instruktur untuk 4 jenis keterampilan yaitu keterampilan batik, keterampilan jahit, bordir dan kerajinan tangan, keterampilan tata rias, spa, dan tata rambut, keterampilan olahan pangan.

Kelas batik merupakan kelas keterampilan yang wajib diikuti oleh seluruh warga binaan pada satu bulan pertama. Terdapat 3 instruktur pada kelas ini sesuai dengan bidang keterampilan batik masing-masing dan 10 klien yang masih dalam kelas batik. Proses pemberdayaan melalui pemberian keterampilan batik didukung dengan peralatan yang memadai, setiap peserta memiliki alat peraga masing-masing untuk membuat batik.

Bimbingan keterampilan dilakukan setiap hari senin-sabtu tetapi untuk hari Jumat dan Minggu kelas keterampilan libur. Sarana dan prasarana untuk kelas keterampilan ini lengkap yang mencakup mesin jahit listrik, mesin jahit manual, mesin obras, alat peraga, mesin bordir, papan tulis, kursi, meja, dan lainnya.

Klien yang masuk kelas keterampilan tata rias, spa, dan tata rambut akan diberi keterampilan yang berkaitan dengan salon seperti *facial*, tata rias *make up*, spa, tata rias pengantin, dan cara membuat janur. Seperti halnya kelas keterampilan lainnya, sarana dan prasarana pendukung pada kelas keterampilan salon juga lengkap sudah disediakan oleh BPRSW sehingga kegiatan pemberdayaan dapat berjalan dengan lancar.

Kelas olahan pangan mempelajari tentang berbagai masakan baik dari Indonesia maupun luar negeri, dari makanan tradisional, makanan harian, serta makanan kelas hotel berbintang. Bahan makanan dan peralatan disediakan oleh BPRSW. Pada kelas keterampilan ini bahan makanan dan peralatan memasak tersedia lengkap tetapi proses pemberian materi pemberdayaan tentang olahan pangan kurang berjalan maksimal dikarenakan peserta kurang telaten untuk belajar memasak mulai dari malas menulis resep dan mengukur takaran bahan makanan.

Melalui pemberian bimbingan pada proses pemberdayaan di BPRSW Yogyakarta, klien korban KDRT mampu kembali memiliki semangat hidup karena pada saat pemberian materi pemberdayaan, para instruktur secara tidak langsung juga memberikan motivasi hidup untuk klien korban KDRT. Selain itu wawasan mereka menjadi lebih terbuka bahwa wanita harus mandiri dan tidak bergantung terhadap pihak manapun sehingga klien korban KDRT berani untuk merencanakan

apa yang akan mereka lakukan setelah lulus dari BPRSW Yogyakarta tidak hanya pasrah dengan kondisi yang dialami.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Waryatin tahap transformasi kemampuan di LKP “Bu Nandang” yaitu dengan memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan kepada perempuan melalui program kursus dan program keterampilan yang diselenggarakan, seperti kursus tata rias pengantin, tata rias kecantikan rambut, spa terapis, hantaran dan souvenir, limbah kreasi, kewirausahaan, dan sebagainya. Hal yang sama juga dilakukan oleh BPRSW Yogyakarta yaitu memberikan keterampilan untuk menambah *skill* warga binaan. Pada penelitian terhadap perempuan korban kekerasan di BPRSW sebelum diberikan bimbingan keterampilan terlebih dahulu harus dilakukan bimbingan fisik, mental, serta bimbingan sosial. Hal tersebut dikarenakan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki kondisi psikologis dan latar belakang yang berbeda dengan peserta yang ada pada LKP “Bu Nandang”.

3. Tahap Kemampuan Intelektual

Tahapan ketiga menurut Sulistiyan yaitu tahap peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan yang diperlukan. Tahap ini dapat membentuk masyarakat menjadi mandiri dan memiliki keterampilan serta pengetahuan yang luas akan kondisi yang mereka hadapi. Kemandirian dan keterampilan masyarakat akan terbentuk apabila masyarakat mampu membantu inovasi

di lingkungan masyarakatnya, yang nantinya inovasi tersebut mampu mengembangkan diri mereka untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang mereka harapkan. BPRSW Yogyakarta juga memiliki tujuan agar warga binaan dapat menyesuaikan diri ketika sudah kembali ke lingkungan sosialnya.

Pada tahap ini klien korban kekerasan dalam rumah tangga diberi pengetahuan lebih dalam tentang kesiapan mental maupun keterampilan agar setelah keluar dari BPRSW Yogyakarta dapat mandiri baik membuka usaha maupun bekerja sesuai dengan keterampilan yang sudah dipelajari.

BPRSW melakukan tahap peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan yang diperlukan salah satunya dengan bimbingan pra pemulangan. Bimbingan tersebut merupakan tahap warga binaan yang sudah selesai diberi bimbingan sebelum dikembalikan ke daerah dan keluarga masing-masing. Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan cara memberikan bimbingan nasihat dan pesan-pesan untuk bekal klien setelah keluar dari BPRSW dengan harapan mereka dapat melaksanakan kehidupan dengan baik agar dapat membawa perubahan baik untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat, serta dapat membawa nama baik BPRSW.

Selain itu diberikan juga bimbingan kesiapan dan peran serta dalam masyarakat. Pada tahap ini dilakukan upaya koordinasi dan kerjasama dengan aparat setempat. Keikutsertaan klien dalam kegiatan kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Bimbingan ini diberikan kepada warga binaan untuk menyiapkan diri dan mental setelah keluar dari BPRSW agar mampu kembali bersosialisasi di tempat asalnya dan mampu menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya. Melalui koordinasi dengan aparat daerah setempat diharapkan mereka dapat bekerjasama dengan BPRSW untuk memantau kehidupan sosial klien korban KDRT ketika sudah dikembalikan di keluarganya.

Kemudian klien korban kekerasan dalam rumah tangga juga dibekali dengan bimbingan usaha kerja, seperti *Achievment Motivation Training (AMT)* dan *Field Study Perusahaan*.

Terdapat juga Praktik Bimbingan Kerja (PBK) atau penempatan praktik bimbingan kerja di perusahaan sesuai bidang keterampilan masing-masing warga binaan selama 25 hari kerja di wilayah DIY. Tujuannya yaitu menerapkan ilmu yang diperoleh dan membangun motivasi bekerja. Untuk sampai pada proses PBK ini, klien harus menyelesaikan bimbingan keterampilan sampai dianggap mampu oleh instruktur maupun Pekerja Sosial BPRSW Yogyakarta. Hambatan yang terjadi yaitu klien belum mampu menguasai keterampilan yang sudah dipilih lebih dari satu tahun sehingga klien korban KDRT tetap harus belajar kembali sampai mereka sudah merasa siap dan mendapat rekomendasi dari instruktur keterampilan untuk mengikuti Praktik Belajar Kerja.

Setelah klien korban KDRT menyelesaikan Praktik Bimbingan

Kerja, mereka akan kembali ke tempat asal untuk membuka usaha sendiri maupun bekerja di tempat yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian BPRSW Yogyakarta menyediakan Sertifikasi Alumni untuk para alumni yang sudah lulus dari BPRSW yaitu pendalaman keterampilan yang terstandarisasi bagi alumni BPRSW tujuannya untuk memberikan bukti sertifikat keterampilan yang diakui. Diharapkan sertifikat tersebut dapat menjadi bekal usaha atau bekerja. Sertifikasi dilaksanakan selama dua bulan, bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) yang terakreditasi di wilayah DIY. Alumni yang lulus sertifikasi akan memperoleh sertifikat keahlian sesuai dengan jenis keterampilan.

Setelah mendapat sertifikasi, klien korban KDRT juga berkesempatan memperoleh bantuan stimulan yang diberikan oleh Kemendagri yang difasilitasi oleh BPRSW Yogyakarta. Bantuan tersebut berupa satu set peralatan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Akan tetapi program pemberian bantuan stimulan ini tidak selalu tersedia setiap tahunnya. Hambatan lain yang dihadapi klien korban KDRT yaitu untuk memperoleh bantuan stimulan syarat yang harus dipenuhi sulit yaitu klien korban KDRT harus memiliki usaha yang sudah berbadan hukum.

Kemudian enam bulan terhitung setelah klien korban KDRT keluar dari BPRSW, akan ada bimbingan lanjut yang dilakukan oleh pekerja sosial. Mereka akan memantau dan membimbing kembali klien yang sudah lulus dari BPRSW selama.

Pelaksanaan bimbingan lanjut dilakukan dengan *home visit*, konseling, temu alumni, kunjungan tempat kerja, monitoring bantuan stimulan, dan bimbingan perencanaan usaha. Bimbingan tersebut mencakup bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat, bimbingan penempatan usaha, dan bantuan pengembangan usaha. Hal ini dilakukan untuk memastikan kembali bahwa alumni BPRSW dapat bersosialisasi kembali dan mengaplikasikan keterampilan yang sudah diperoleh selama menjadi warga binaan di BPRSW Yogyakarta.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Waryatin, Tahap peningkatan kemampuan intelektual di LKP "Bu Nandang" dilakukan dengan beberapa cara antara lain mengadakan bimbingan kewirausahaan, membantu mediasi bantuan pinjaman permodalan, mengadakan pelatihan untuk alumni. Hal yang sama juga dilakukan oleh BPRSW Yogyakarta, tahap peningkatan kemampuan intelektual dilakukan melalui bimbingan usaha kerja, bimbingan kesiapan dan peran serta dalam masyarakat, bimbingan usaha lanjut, kegiatan magang, pemberian stimulan, dan sertifikasi alumni. Pada penelitian ini peserta program pemberdayaan sangat disiapkan untuk kembali ke masyarakat sehingga terdapat bimbingan kesiapan dan peran serta dalam masyarakat karena diperlukan koordinasi yang baik dengan aparat di tempat klien tinggal.

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Terdapat beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi kelancaran proses pemberdayaan antara lain: (1) Fasilitas yang memadai seperti ruang keterampilan, mushola, asrama, aula, dan yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan seperti peralatan salon, *make up*, peralatan jahit, kain, mesin bordir, peralatan untuk membatik, pewarna, oven, bahan masakan, kompor dan peralatan masak lainnya sudah disediakan oleh BPRSW. (2) Program yang diselenggarakan tidak dipungut biaya, BPRSW bertugas memberikan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk membantu wanita dengan permasalahan sosial seperti perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak meminta biaya apapun dari klien. Jadi program pemberdayaan yang ada diberikan secara gratis kepada masyarakat yang menjadi warga binaan di BPRSW Yogyakarta. (3) Motivasi belajar warga binaan yang tinggi. Setelah jam kelas keterampilan selesai, ruang keterampilan seperti ruang jahit, ruang batik, dan salon tidak dikunci. Hal tersebut dikarenakan para klien menggunakan ruang keterampilan tersebut untuk berlatih secara mandiri setelah jam kelas keterampilan selesai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar warga binaan tinggi. (4) Instruktur keterampilan yang kompeten. Seluruh pengajar atau instruktur merupakan orang yang ahli pada masing-masing. Ada yang berasal dari hotel dan ada juga yang memiliki usaha sesuai bidang keterampilan yang diajarkan sehingga instruktur yang berkompeten tersebut akan memberikan keterampilan yang baik dalam proses pemberdayaan.

Sedangkan beberapa faktor penghambat dalam pemberdayaan perempuan korban

KDRT di BPRSW Yogyakarta antara lain syarat pemberian bantuan stimulant sulit, bimbingan psikologi kurang maksimal, kurangnya praktik kegiatan bimbingan kewirausahaan, dan kurangnya dukungan dari keluarga.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan terkait dengan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di BPRSW sudah berjalan cukup baik. Pada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terjadi perubahan sikap perempuan korban KDRT yaitu menjadi lebih terbuka dan berani mengambil keputusan untuk masa depan mereka yaitu dengan menjalani program pemberdayaan. Pada tahap transformasi kemampuan, terjadi perubahan kemampuan pada klien korban KDRT yaitu peningkatan keterampilan antara lain batik, jahit, tata boga, dan keterampilan salon. Selain itu terjadi perubahan sikap seperti menjadi berfikir lebih positif dan percaya diri untuk merencanakan apa yang akan dilakukan setelah lulus dari BPRSW karena mereka sudah memiliki bekal keterampilan. Pada tahap peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan, terjadi peningkatan kemampuan intelektual ini menunjukkan bahwa klien korban KDRT memiliki kesempatan dan peluang untuk menjadi lebih mandiri.

Faktor pendukung dalam proses pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di BPRSW Yogyakarta berupa fasilitas yang memadai, program yang diselenggarakan tidak dipungut biaya, motivasi belajar warga binaan yang tinggi, dan instruktur

keterampilan yang kompeten. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain syarat pemberian bantuan stimulan sulit, bimbingan psikologi kurang maksimal, kurangnya praktik dari bimbingan kewirausahaan, dan kurangnya dukungan dari keluarga.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta, maka diperoleh beberapa saran antara lain:

1. Kegiatan praktik bimbingan kewirausahaan dilakukan lebih intensif lagi agar klien korban KDRT dapat mengaplikasikan pengetahuan kewirausahaan dengan lebih maksimal.
2. BPSW menyampaikan evaluasi kepada Kemendagri terkait syarat pemberian bantuan stimulant agar klien korban kekerasan dalam rumah tangga ketika sudah menyelesaikan program pemberdayaan dapat memiliki modal untuk membuka usaha sesuai dengan keterampilan yang diikuti.
3. Pemberian bimbingan psikologis yang lebih intensif agar peserta dapat mengontrol dirinya sendiri sehingga proses pemberian keterampilan dapat berjalan lebih efektif.
4. Keluarga harus lebih mendukung anggota keluarganya yang menjalankan program pemberdayaan di BPRSW Yogyakarta karena dukungan dari keluarga sangatlah penting untuk menambah semangat moril bagi klien korban KDRT yang sedang menjalani program pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu & Cholid Narbuko. (2008). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Daulay, Harmona. (2006). *Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Pedagang Jamu di Gedong Johor Medan)*. Jurnal Harmoni Sosial Volume I No. 1 Departemen Sosiologi FISIP USU, 7-14.
- Daulay, Harmona. (2006). *Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus Pedagang Jamu Gedong Johor Medan*. Jurnal Harmoni Sosial, Volume I Nomor I, September 2006.
- Gandhi, Mahatma. (2011). *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hubeis, Aida Vitalaya S. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufidah, (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press.
- Nuridin, Muhamad Fadhil. (1990). *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Angkasa.
- Novian, Budhy. (2010). *Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan*. Artikel Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.
- Purwanto, April. (2012). *Manajemen Pemberdayaan*. Yogyakarta: Pistaza.
- Rahmawati, Ranny. (2014). *Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan*. *Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember*. Skripsi. Jember: Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Jember
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif yuridis-viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri, Meiyenti. (1999). *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gajah Mada.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. Bandung: Elfabeta.
- Suharto, Edi. (2004). *Pendekatan Pekerjaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Konsep, Indikator, dan Strategi*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sukardi. (2016). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sulistiyani Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syarif, Muhidin. (1997). *Pelayanan Sosial untuk Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan*. Bandung: STKS.
- Waryatin. (2012). *Pemberdayaan Perempuan dalam Mengembangkan Kewirausahaan Pada LKP "Bu Nandang" di*

Kelurahan Gumilir, Kabupaten Cilacap. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta

Wibhawa, Budhi dkk. (2010). *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Widi, Restu Kartiko. (2010). *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Diakses pada 02 Januari 2019 dari <http://www.kemenpar.go.id>

